

BAB 2

PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN

2.1. Sekilas tentang Perpolitikan Iran

Untuk ukuran negara-negara berkembang di kawasan Timur Tengah, sistem politik yang berlaku di Republik Islam Iran bisa dikatakan termasuk relatif “liberal”. Kendati struktur politik negara ini dilandaskan pada ajaran Islam mazhab Syiah yang cenderung bersifat “teokratis”, dalam praktiknya lembaga-lembaga politik “modern” mendapatkan tempat yang cukup penting. Jabatan presiden misalnya dibatasi hanya untuk dua periode (dua kali empat tahun). Presiden dan Parlemen (*Majles Syura-e Isalmi*) dipilih secara langsung melalui pemilihan umum yang benar-benar bebas, rahasia, jujur, dan adil. Juga semua anggota kabinet yang diangkat presiden terpilih masih harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota parlemen.¹

Ajaran Syiah telah menjadi identitas bangsa Iran dan sumber legitimasi politik sejak abad keenam belas ketika dinyatakan sebagai agama negara Iran. Islam Syiah telah terlibat dalam percaturan politik sejak kemunculannya dan karena itu memiliki sejarah dan sistem kepercayaan yang dapat ditafsirkan dan dimanfaatkan dalam krisis politik.²

Sejarah Iran modern didominasi oleh Dinasti Palevi (1925-1979). Dibawah Reza (Khan) Syah (1925-1941) dan putranya Mohammad Reza Syah (1941-1979) Iran modern membentuk dirinya. Pada akhir 1920-an dan 1930-an, Reza Syah merebut kekuasaan dan mendirikan Dinasti Pahlevi. Terimbas oleh langkah rekan sezamannya di Turki, Mustafa Kemal (Ataturk), dia memusatkan perhatiannya pada modernisasi dan pembentukan pemerintahan terpusat yang kuat, mengandalkan angkatan bersenjata dan birokrasi modern. Seperti di Mesir dan negara-negara Muslim lain yang beranjak modern, para ulama kehilangan sumber-

¹Sihbudi, Riza, “Menyandera Timur Tengah”, Mizan, 2007 hal. 245

² Esposito, John L. & John O. Voll, “Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek”, Mizan, 1999 hal.67

sumber utama kekuasaan dan kekayaan karena posisi mereka digantikan oleh pengadilan, pengacara, hakim, notaris, dan guru sekular modern.³

Republik Islam Iran berdiri pada tahun 1979 setelah apa yang dinamakan sebagai Revolusi Iran pecah. Revolusi Islam Iran yang berhasil menggulingkan kerajaan Iran pada tahun 1979 merupakan salah satu revolusi rakyat yang pertama dalam perempat terakhir abad ke-20 melawan sebuah sistem politik otoriter modern. Adalah Ayatullah Khomeini yang menjadi tokoh dibalik peristiwa bersejarah yang merubah tatanan perpolitikan Iran, Khomeini merupakan tokoh sentral yang berhasil menjatuhkan Syah, mengakhiri tradisi kerajaan sepanjang 2.500 tahun di Iran, mengubah persahabatan Amerika Serikat-Iran selama tiga dasawarsa menjadi permusuhan dan selama 10 tahun menjadi pimpinan yang tak tertandingi.⁴ Syah dikecam karena dianggap terlalu takluk pada negara Barat khususnya Amerika dan referendum pada Maret 1979 berhasil merubah pemerintahan Iran dari monarki menjadi republik Islam, dengan sistem politik yang menempatkan kaum mullah (ulama) pada posisi sentral.

Revolusi Iran juga diikuti oleh peristiwa-peristiwa penting seperti penyanderaan 50 diplomat Amerika Serikat di kedutaan besar mereka di Teheran, perang dengan Irak yang berlangsung selama 8 tahun (1980-1988), serta pengeluaran fatwa oleh Imam Khomeini untuk menghukum mati Salman Rushdie yang merupakan seorang penulis sebuah novel berjudul "Ayat-ayat Setan" yang isinya menghina Nabi Muhammad SAW. Peristiwa-peristiwa tersebut menempatkan Iran dalam posisi "musuh bebuyutan" bagi negara-negara Barat, Amerika Serikat khususnya dan Khomeini sendiri menyebut Amerika Serikat sebagai "Setan Besar"⁵

Terdapat dua hal menarik dalam perubahan perpolitikan Iran tersebut, diantaranya:

1. Sejak berdiri pada 1979, Republik Islam Iran sudah mengalami pergantian Presiden sebanyak lima kali, dan Mahmoud Ahmedinejad yang terpilih pada Juni 2005 merupakan presiden keenam di "negeri kaum mullah" ini.

³ Ibid hal.69

⁴ Ibid hal.79

⁵ Riza Sihbudi hal.269

2. Pergantian jabatan Pemimpin (Spiritual) “*Imam*” dan “*Faqih*” atau *Rahbar* dari Ayatullah Al-Uzma Ruhollah Al-Musavi Al-Khomeini Bapak Revolusi Islam Iran dan Pendiri Republik Islam Iran, yang wafat pada 3 Juni 1989 ke Ayatullah Ali Khamenei, ternyata berlangsung tanpa adanya gejolak politik yang berarti. Padahal ketika Imam Khomeini dalam keadaan sakit keras, hampir semua media massa Barat memprediksikan akan terjadinya pertarungan politik untuk memperebutkan posisi pemimpin spritual itu.⁶

Iran sendiri dalam pemerintahan dikuasai oleh dua kubu yang oleh pengamat dan media massa Barat disebut sebagai kubu mullah “reformis” dan “konservatif”. Kaum mullah “reformis” yang dimotori oleh Khatami justru dalam program ekonominya sangat “koservatif” karena lebih mengutamakan campur tangan negara di sektor perekonomian, kebijakan ini banyak dikeluhkan oleh para pebisnis Iran karena cenderung memberi peluang akan adanya praktek korupsi di kalangan birokrasi.

Di sisi lain kubu mullah “konservatif” yang diotaki oleh Ayatullah Nateq-Nouri justru cenderung pada kebijakan ekonomi yang lebih “liberal”. Kubu ini menghendaki adanya perluasan swastanisasi sektor ekonomi.

Namun kedua mullah tersebut pada intinya sebenarnya tidak seperti yang digambarkan oleh media massa Barat yang terkesan kaku. Salah satu indikasinya adalah sikap kaum mullah di Iran terhadap kaum Taliban di Afghanistan, hubungan antara Iran dan Taliban tidak pernah akur. Teheran juga tidak memberikan dukungan terhadap kelompok Syiah Irak garis keras yang gencar memerangi pasukan pendudukan Amerika Serikat, Teheran bahkan lebih dekat dengan kaum mullah moderat di Irak seperti Ayatullah Al-Uzma Hussein Ali Al-Sistani. Dan Teheran juga mendukung kaum Syiah Irak yang tergabung dalam Majelis Tertinggi Revolusi Islam Irak yang dipimpin oleh Sayyid Abdul Aziz Al-Hakim yang merupakan anggota Dewan Pemerintahan Irak bentukan Amerika Serikat.

⁶ Riza Sihbudi hal.245

Dari situ dapat disimpulkan bahwa kebijakan Amerika Serikat yang terus memusuhi Iran karena sebenarnya didasari oleh minimnya pemahaman para pengambil keputusan di Gedung Putih tentang kaum mullah di Iran. Selama ini Iran bahkan tidak pernah menjalin persekutuan dengan Al-Qaidah atau kelompok-kelompok ekstrim lainnya. Dalam kasus Israel memang sikap mereka sangat jelas dan keras bahwa mereka tidak akan mengakui keberadaan negara Israel sepanjang kaum Yahudi belum mengembalikan wilayah-wilayah Arab/Palestina yang mereka duduki. Oleh sebab itu jelas terlihat bahwa sikap Amerika Serikat yang terus memusuhi Iran karena lebih disebabkan adanya faktor tekanan dari kaum lobi Yahudi yang sangat kuat pada pemerintahan di Gedung Putih.

Penulisan Tesis ini sendiri membatasi periode hingga sebatas dari tahun 1997 hingga 2008 yang merupakan masa pemerintahan dua presiden Iran yaitu Khatami dan Ahmadinejad.

2.1.1. Periode 1997-2005 (Masa Pemerintahan Mohammad Khatami)

Tahun 1997 merupakan pemilihan presiden Iran yang menarik banyak perhatian dan dapat dianggap sebagai hal bersejarah bagi Iran karena dua hal: *pertama*, dalam usianya yang waktu itu baru 18 tahun, pemerintahan kaum mullah (ulama) ternyata cukup berhasil dalam memantapkan sistem politik yang cukup demokratis, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden yang hanya boleh dua kali empat tahun. Pasal 114 Konstitusi Iran menyebutkan: “*The President is elected for a four-year term by the direct vote of the people. His re-election for a successive term is permissible only once.*” Berdasarkan ketentuan ini, Hojjatulislam Ali Akbar Hashemi Rafsanjani yang sudah dua periode (1989-1993; 1993-1997) menjadi presiden, secara otomatis tidak bisa dipilih kembali.⁷

Kedua, pemilu 1997 di Iran berlangsung di tengah menguatnya persaingan di tingkat elite politiknya, terutama antara kaum mullah “kanan” yang tergabung dalam fraksi *Jam’iyyate ‘Ulama-e Mobarez* atau kelompok *Rohaniyat* di bawah pimpinan ketua parlemen Ayatullah Ali Akbar Nateq-Nouri dengan kaum mullah

⁷ Riza Sihbud, hal. 250

“kiri” yang tergabung dalam faksi *Majma' Rohaniyoon-e Mobarez* yang dipimpin oleh mantan ketua parlemen Hojjatulislam Mehdi Karoubi. Kelompok *Rohaniyat* yang didukung kaum pedagang *Bazaari* yang merupakan kelas menengah “tradisional” yang cukup berpengaruh dalam ekonomi-politik Iran mencalonkan Nateq-Nouri. Sedangkan kelompok *Rohaniyoon* yang berkoalisi dengan apa yang disebut sebagai “kaum pengikut garis Imam Khomeini” semula mencalonkan mantan PM Dr. Mir-Hussein Musavi. Namun, karena Musavi yang pernah dikenal sebagai salah satu tokoh “garis keras” itu kurang direstui oleh pemimpin spiritual Ayatullah Ali Khameini, kelompok ini kemudian mengajukan mantan Menteri Kebudayaan Mohammad Khatami⁸

Kemenangan Khatami mendapat sambutan positif dari sejumlah pimpinan negara-negara Timur Tengah dan dunia internasional pada umumnya. Mereka yang memberikan selamat kepada Khatami seraya mengharapkan adanya peningkatan kerjasama dengan Iran, antara lain datang dari para pemimpin Bahrain, Qatar, Jerman, Pakistan, India, Oman, Rusia, Jepang, Prancis, Maroko, Suriah, dan Arab Saudi, bahkan sang “musuh bebuyutan” Amerika Serikat. Ini semua menunjukkan bahwa Khatami mendapat dukungan luas tidak hanya dari dalam negeri namun juga dari dunia internasional.

Khatami berkuasa selama dua periode, pada 8 Juni 2001 pemilu Iran kembali berlangsung dan Khatami berhasil meraih kemenangan dengan total suara sebesar 79%, meningkat dari 68% suara yang diperolehnya pada pemilu tahun 1997. Ini merupakan rekor tersendiri bagi Khatami karena dalam 22 tahun sejarah Republik Islam Iran belum pernah terjadi dimana seorang presiden berhasil memperoleh suara lebih besar pada periode keduanya.

Ada dua faktor penting yang menjadi penentu kemenangan Khatami yang kedua kalinya: *pertama*, selain Khatami tidak ada kandidat lain yang popularitasnya menyamai apalagi melebihi Khatami. Berbeda dengan Pemilu 1997, ketika muncul dua nama yang dinominasikan (Khatami dan Nateq-Nouri). Kubu “garis keras” tidak mengajukan calon mereka untuk menantang Khatami karena kemungkinan mereka sengaja “menyimpan tenaga” dalam pemilihan tahun 2001

⁸ ibid

dan kemudian berusaha keras memenangkan pemilihan berikutnya pada saat Khatami tidak mungkin lagi mencalonkan diri karena telah menjabat selama dua periode.

Kedua, sejak kemenangan Khatami pada tahun 1997, popularitas kaum “kiri” (reformis) pro-Khatami (kendati mendapat tekanan hebat dari lawan-lawan politik mereka) semakin meningkat. Ini terbukti dari keberhasilan mereka dalam memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan para anggota dewan lokal (pada pemilu 1999) maupun parlemen pusat atau *Majles Syura Islami* (pemili 2000). Tekanan yang semakin keras terhadap kubu “kiri” dalam kenyataannya justru semakin meningkatkan simpati mayoritas rakyat Iran terhadap mereka dan sebaliknya dengan kelompok “kanan” yang justru semakin tidak populer.⁹

Walaupun masih berada dalam sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS kepada Iran sejak 1979, Iran menjadi negara yang diminati oleh para investor asing khususnya dari negara-negara Timur Tengah. Sejak kejadian 911, para kelompok bisnis di kawasan Timur Tengah mulai berhati-hati menanamkan uang mereka di negeri Paman Sam tersebut dan hasilnya mereka mulai mengalihkan perhatian kepada Iran.

Iran sendiri pada masa sejak kemenangan Khatami sudah berulang kali menyatakan kesediaannya untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat, namun usaha mereka sepertinya menemui jalan buntu karena Gedung Putih didominasi oleh kaum neokonservatif yang masih menilai Iran sebagai bagian dari “poros kejahatan”. Padahal dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya, Iran merupakan pasar yang tak bisa diabaikan. Apalagi jika demokratisasi di Irak yang dipelopori oleh Amerika Serikat sendiri dapat berjalan dan kaum Syiah yang merupakan mayoritas pada akhirnya mengambil alih kekuasaan di Baghdad, maka persekutuan Iran-Irak menjadi sulit dielakkan. Hal itu yang menyebabkan Iran cenderung bersikap hati-hati dalam menanggapi pergolakan di Irak karena bagi Iran, demokratisasi di Irak justru lebih menguntungkan bagi Teheran ketimbang bagi Amerika Serikat sendiri.¹⁰

⁹ Riza Sihbudi hal. 264

¹⁰ Riza Sihbudi, hal.272

2.1.2. Periode 2005-2009 (Masa Pemerintahan Ahmadinejad)

Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2005 kembali membuat kejutan besar bagi kancah perpolitikan di Iran, hal itu disebabkan karena untuk pertama kalinya dalam sejarah terbentuknya Republik Islam Iran pada tahun 1979, pemilihan presiden harus dilakukan melalui dua putaran.

Putaran pertama pada 17 Juni 2005 tidak ada satupun kandidat yang mampu memperoleh suara lebih dari 50%. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, seorang konglomerat dan politikus kawakan yang saat itu berusia 71 tahun serta sudah pernah menjabat menjadi presiden selama dua periode (1989-1997) yang semula diperkirakan akan dengan mudah meraih suara mutlak ternyata hanya memperoleh 21% suara.

Kejutan besar kedua tampilnya Dr. Mahmoud Ahmadinejad sebagai peraih suara terbesar kedua (19.5%). Padahal walikota Teheran ini sebelumnya kalah pamor dari para kandidat lain seperti Mostafa Moin (mantan menteri pendidikan), Mehdi Karoubi (mantan ketua parlemen), atau Mohammad Baqer Qalibaf (mantan kepala kepolisian). Sejumlah jajak pendapat yang diadakan sebelum pemilihan semuanya mengunggulkan Rafsanjani di tempat teratas diikuti oleh Moin atau Karoubi dan Qalibaf. Pemilihan presiden kali ini juga menunjukkan cukup tingginya tingkat partisipasi politik rakyat Iran, hal tersebut ditunjukkan dari jumlah partisipan yang menunjuk ke angka 65% dari mereka yang memiliki hak pilih, bahkan angka tersebut jauh lebih tinggi dari yang dicapai AS pada pilpres yang diselenggarakan pada November 2004 yang hanya mencapai angka 50% dari jumlah pemilik hak suara.

Lalu kejutan berikutnya muncul pada putaran kedua pemilihan presiden, Ahmadinejad mampu menyisihkan seluruh pesaingnya dan meraih kemenangan mutlak dengan mengantongi suara sebesar 61.6% sementara saingan terberatnya Rafsanjani hanya berhasil mendapatkan 35.9% suara. Padahal pada putaran pertama Rafsanjani lebih unggul dibanding Ahmadinejad. Tidak satupun pengamat, media massa atau jajak pendapat menempatkan Ahmadinejad sebagai salah satu kandidat yang diunggulkan. Ternyata ia berhasil lolos bahkan secara telak mengalahkan saingan terberatnya yang merupakan kandidat yang paling

diunggulkan dan kemenangannya sangat diharapkan pihak Barat termasuk AS didalamnya.

Ahmadinejad lahir di kota Gamsar (sebelah tenggara Teheran) pada tahun 1956. Ayahnya merupakan seorang pandai besi dan mereka pindah ke Teheran pada saat usianya baru setahun. Pada 1976 Ahmadinejad masuk Universitas Sains dan Teknologi (IUST) di Teheran dan sepuluh tahun kemudian ia mengikuti program master di bidang teknik sipil dan akhirnya meraih gelar doktor di bidang perencanaan dan teknik transportasi di universitas yang sama.

Dalam kancah perpolitikan Iran, nama Ahmadinejad baru dikenal cukup luas ketika ia dipilih menjadi walikota Teheran pada 3 Mei 2003. Karir politiknya sendiri sudah dimulai ketika ia tergabung dalam organisasi mahasiswa bernama *Daftar-e Tahkim-e Vahdat* (Office for Strengthening Unity) sebagai wakil dari IUST.

Ketika berkobar perang Iran-Irak (1980-1988), Ahmadinejad sempat bergabung dalam milisi *Bassij* dan kemudian *Pasdaran* (Pasukan Garda Revolusi Islam Iran). Ia juga sempat menjadi komandan *Pasdaran* dan berhasil menyusup ke wilayah Kirkuk (Irak). Setelah perang berakhir, karir politiknya semakin menanjak, ia dipercaya menduduki kursi Wakil Gubernur di Provinsi Maku, kemudian menjadi Gubernur di Khoy serta Penasihat Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam. pada 1993-1997, ia menjadi Gubernur Provinsi Ardabil. Tapi namanya baru mulai dikenal cukup luas ketika ia terpilih menjadi Walikota Teheran.¹¹

Ada dua fakta penting yang menjadi ciri pembeda Presiden Ahmadinejad:

Pertama, ia merupakan Presiden Iran pertama yang berasal dari keluarga miskin pedesaan dan tidak memiliki hubungan dengan tokoh agama. Sebagai anak seorang pandai besi, ia mewujud dalam pandangan rakyat sebagai “putra sejati bangsa” yang jauh dari ragam aristokrasi karena nasab, kekayaan, maupun agama.

Kedua, yang merupakan fakta yang paling penting, Ahmadinejad adalah islamis sejati, dengan bahasa lain ia mengelompokkan dirinya sebagai fundamentalis dan revolusionis.¹²

¹¹ Riza Sihbudi, hal. 273-274

¹² Adel El-Gogary, hal.32

Ketika menjabat menjadi walikota Teheran, Ahmadinejad dinilai cukup berhasil karena semasa ia menjabat, ibukota Iran tersebut menjadi salah satu kota yang paling bersih dan teratur di kawasan Timur Tengah. Satu hal lagi yang lebih penting adalah kedekatan ia dengan golongan rakyat kelas bawah, bahkan tak jarang ia mendatangi warga Teheran yang masih menganggur dan lalu memberi mereka pekerjaan sekalipun hanya sebagai tukang sapu jalanan atau penjual barang asongan.

Ia sering mengatakan, “tak ada bedanya antara jabatan walikota atau bahkan presiden dengan tukang sapu jalanan, karena tugas utama mereka sama, yaitu melayani rakyat banyak”. Dalam kampanyenya ia juga mengangkat isu-isu yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat banyak seperti pemberantasan korupsi, pengangguran, dan kemiskinan yang cenderung makin meningkat. Namun Ahmadinejad tidak hanya beretorika, ia benar-benar mempraktikkan gaya hidup sederhana bahkan cenderung puritan. Setelah dua tahun menjadi pejabat paling tinggi di ibukota Teheran, misalnya ia tetap tinggal di sebuah rumah kontrakan, serta menyetir sendiri mobilnya yang buatan tahun 1970-an itu. Ada yang mengatakan ia tidak mengeluarkan sepeser pun untuk kampanye. Ia memang langsung melakukan pendekatan ke kalangan rakyat kelas bawah dan berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Inilah salah satu kunci sukses Ahmadinejad dalam pilpres Iran 2005.¹³

Ketika Ahmadinejad berhasil memenangkan pemilihan presiden tahun 2005, yang paling terkejut dengan kemenangannya adalah pihak Amerika Serikat termasuk di dalamnya Israel juga, karena mereka mengharapkan Rafsanjani yang menjabat menjadi presiden bukannya Ahmadinejad. Karena tidak seperti Ahmadinejad, Rafsanjani dalam kampanyenya mengangkat isu reformasi dengan agenda memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat. Sementara Ahmadinejad dengan tegas justru mengatakan bahwa Iran tidak perlu melakukan perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat. Itulah salah satu sebab kenapa Amerika Serikat begitu vokal menyatakan bahwa hasil pemilihan di Iran tidaklah demokratis dengan alasan bahwa kekuasaan tertinggi di tangan “segelintir” mullah yang tidak dipilih,

¹³ Riza Sihbudi, hal. 275

padahal sebenarnya Amerika Serikat sangat kecewa dengan hasil pemilihan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Ahmadinejad sendiri menanggapi sikap Amerika Serikat dengan dingin dan dengan berani menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak punya hak mengomentari hasil pemilu Iran. Iran hanya akan menjalin hubungan dengan negara-negara yang tidak memusuhi rakyat, negara, dan sistem politik Republik Islam Iran. Soal hubungan Iran dengan AS biarlah rakyat Iran sendiri yang menentukan. Namun tetap disisi lain ia juga menentang segala tindakan teroris dan memiliki tekad untuk mengembangkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara tetangganya.

Mengenai persoalan nuklir, Ahmadinejad juga menegaskan bahwa Iran akan tetap melanjutkan perundingan soal nuklir dan menekankan hak nasional bangsa Iran untuk melanjutkan program nuklir guna tujuan damai. Ahmadinejad juga menyambut baik masuknya investasi asing dan berjanji tidak akan mengurangi kebebasan. Yang dimaksud kebebasan disini adalah rakyat diperbolehkan untuk melontarkan kritik terhadap pemerintah karena menurut Ahmadinejad kebebasan merupakan salah satu bagian dari semangat revolusi Iran dan budaya islam sendiri selalu membuka diri terhadap kritik.

Politik luar negeri Iran pada masa pemerintahan Ahmadinejad cenderung revolusioner daripada pragmatik jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Khatami. Ahmadinejad telah menepati janjinya kepada para pemilihnya, dimana dia menegaskan bahwa dia akan menjadi “suara orang-orang lemah” dan akan teguh berdiri menghadapi hegemoni kekuatan-kekuatan internasional yang congkak.¹⁴

Sementara hubungan dengan negara-negara tetangga semakin dipererat seperti yang dapat terlihat dari kunjungan Ahmadinejad ke sejumlah ibukota negara Arab seperti Suriah dan Kuwait.

Pandangan Ahmadinejad soal nuklir dapat dikatakan sangat logis dan sederhana sehingga sulit dibantah, ia berpendapat bahwa apabila nuklir itu berbahaya

¹⁴ Adel El-Gogary, hal.92

mengapa ada pihak yang dibiarkan menggunakannya? Dan sebaliknya bila nuklir itu berguna, mengapa ada pihak yang tidak diperbolehkan menggunakannya?

Ahmadinejad menegaskan kembali bahwa memperoleh teknologi nuklir untuk tujuan damai adalah tuntutan seluruh rakyat Iran dan pejabat sebagai wakil rakyat harus berupaya sekuat tenaga untuk merealisasikan tuntutan tersebut.

Ada empat hal penting kenapa Ahmadinejad berpikir bahwa Iran perlu mengembangkan teknologi nuklir, *pertama* teknologi nuklir merupakan hak legal bangsa Iran yang sudah menjadi tuntutan hampir semua rakyat Iran dengan beragam haluan yang ada. *Kedua*, teknologi nuklir tak ayal lagi adalah teknologi paling *sophisticated* dan maju. Pengembangan teknologi ini jelas merupakan tamparan bagi hegemoni Barat yang selalu berusaha mengekang kemajuan apa pun yang hendak dicapai oleh negara-negara di dunia Islam. *Ketiga*, teknologi nuklir dengan mudah akan menempatkan Iran dalam kategori negara maju secara cepat. Bila Iran berhasil memanfaatkan teknologi nuklir untuk kebutuhan listriknya, maka berarti Iran akan mendapatkan beberapa keuntungan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, seiring meroketnya harga minyak dunia, Iran akan meraup devisa lebih besar lewat ekspor minyak dan gas yang lebih banyak. Di samping itu pembangkit listrik tenaga nuklir jauh lebih murah dibandingkan dengan alternatif lain. Dengan demikian biaya subsidi konsumsi listrik nasional yang terus meningkat bisa dikurangi secara drastis. Dan dalam jangka panjang, Iran akan menjadi negara yang hampir-hampir mandiri dalam semua bidang. Dengan memiliki cadangan minyak yang besar dan alternatif teknologi nuklir, secara otomatis Iran akan menjadi negara yang sangat kaya sumber daya. Dan *keempat*, pencapaian sebesar dan sekolosal ini pasti akan menjadi pompaan semangat yang besar bagi rakyat Iran yang telah dirundung berbagai tekanan, embargo, dan kekangan dunia Barat setelah Revolusi 1979.¹⁵

2.2. Program Persenjataan Non-Konvensional Iran

Iran telah mulai mengembangkan program persenjataannya sejak lebih dari 25 tahun yang lalu. Pada tahun 1980-an Iran telah secara aktif dan berkelanjutan

¹⁵ Muhsin Labib, et al, "Ahmadinejad; David di Tengah Angkatan Goliath Dunia", Penerbit Hikmah (PT.Mizan Publika, 2007

mengembangkan program teknologi persenjataannya berupa peluru kendali dan roket jarak jauh. Bahkan program tersebut telah menjadi prioritas nasional yang menghabiskan biaya negara yang besar dan sumber daya yang juga besar¹⁶.

2.2.1. Awal Program

Program persenjataan non-konvensional Iran terutama rudal dimulai berkembang pada akhir tahun 1970-an tepatnya pada masa pemerintahan Shah Muhammed Reza Pahlavi. Program tersebut diawali dengan sebuah proyek bernama “Project Flower”. Proyek ini difokuskan pada pengembangan misil atau rudal yang mengacu seperti yang dimiliki Israel yang diberi nama “Israeli Gabriel anti-ship Missile”¹⁷. Proyek ini diharapkan mampu menciptakan misil dengan jangkauan yang lebih luas (150-200 km) dan memiliki daya yang lebih kuat dibandingkan dengan versi aslinya yaitu yang merupakan milik Israel.

Dari tahun 1972 hingga 1977, Iran mengalami ketergantungan yang akut pada Barat, ketergantungan tersebut meliputi berbagai bidang baik militer, ekonomi, maupun politik. Hasil minyak yang melimpah ruah memungkinkan Syah membeli senjata seharga \$6 miliar dari Amerika Serikat dan kemudian memesan lagi \$12 miliar.

Syah pada masa kekuasaannya bermimpi membuat Iran menjadi salah satu kekuatan militer konvensional terkuat di dunia, dan Washington membakar ambisi itu dengan menunjuknya sebagai polisi di Teluk Persia. Banyak orang Iran memandang penunjukan rezim Syah ini sebagai tanda takluknya Iran sepenuhnya pada Amerika Serikat dan juga hilangnya kemerdekaan Iran. Pandangan masyarakat ini berkembang menjadi sumber keterasingan akut.¹⁸

Namun pada bulan Februari 1979 ketika regim Shah Mohammed Reza Pahlavi jatuh, maka berakhir pula Project Flower tersebut.

¹⁶ http://www.nti.org/e_research/profiles/Iran/Missile/

¹⁷ ibid

¹⁸ John L. Esposito, hal. 76

2.2.2. Tujuan Program

Salah satu tujuan penting Iran mengembangkan program senjata non-konvensional adalah untuk menangkal ancaman-ancaman dari luar. Belajar dari pengalaman perang dengan Irak, Iran kini berusaha keras untuk dapat menjadi kekuatan militer di kawasan Teluk, oleh sebab itu Iran melakukan modernisasi angkatan darat, laut, udara, dan juga melakukan pengembangan dalam rudalnya.

Selain itu Iran merasa perlu mengembangkan program persenjataan non-konvensional karena dianggap mampu meredam keinginan Amerika Serikat dan sekutunya Israel untuk melakukan serangan militer terhadap Iran. Seperti yang kita tahu bahwa antara Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya memang terjalin hubungan yang kurang harmonis. Jadi tujuan utama dari persenjataan non-konvensional yang dijalankan Iran adalah membangun kekuatan-kekuatan strategis yang efektif dan sempurna yang memiliki kekuatan penangkis dari serangan Israel dan Amerika Serikat baik yang konvensional maupun yang suprakonvensional.

Salah satu tujuan Iran mengembangkan persenjataan non-konvensional dapat terlihat dari pandangan Rafsanjani yang merupakan Presiden Iran pada periode 1988-1997 :*"chemical and biological weapons are poor's man atomic bombs and can easily be produced. We should at least consider them for our defense. Although the use of such weapons is inhuman, the war taught us that international laws are only scraps of paper. With regard to chemical, bacteriological, and radiological weapons training, it was made very clear during the (Iran-Iraq) war that these weapons are very decisive. It was also made clear that the moral teachings of the world are not very effective when war reaches a serious stage and the world does not respect its own resolutions and closes its eyes to the violations and all the aggressions which are committed on the battlefield. We should fully equip ourselves both in the offensive and defensive use of chemical, bacteriological, and radiological weapons. From now on you should make use of the opportunity and perform this task"*¹⁹

¹⁹ Kori N.Schake & Judith S.Yaphe,"The Strategic Implications of a Nuclear-Armed Iran",Institute for National Strategic Studies National Defense University Washington D.C., 2001

2.2.3. Perkembangan Program Persenjataan Non-Konvensional Iran

Saat ini Iran telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan program militernya, kini Iran telah memiliki serangkaian rudal dan bom (misil) yang lengkap: Rudal jarak pendek hingga 150 km, rudal jarak menengah yang berdaya jelajah antara 300-500 km, meliputi Shihab-1 (yang merupakan tiruan yang dikembangkan dari rudal Scud-B milik Rusia yang berdaya jelajah 300 km) dan Shihab-2 (yang merupakan tiruan dari rudal Scud-C yang berdaya jelajah hingga 550 km).

Ada lagi rudal-rudal milik Iran yang merupakan produksi lokal yang dikenal dengan nama *Zilzal* yang diyakini merupakan derivasi dari varian rudal-rudal milik Cina yang dikenal dengan nama rudal "Tor M-1" dan berdaya aktif antara 300-800 km.

Laporan Neraca Keuangan Militer 2000-2001 mengisyaratkan bahwa Iran telah memproduksi rudal-rudal tiruan hasil modifikasi dan perbaikan dari rudal-rudal balistik *earth-to-earth* bekerjasama dengan Korea Utara, Cina, dan Rusia. Iran berhasil memproduksi Rudal Shihab-3 yang berdaya jelajah hingga 1.300 km dan sudah diaktifkan pada tahun 1999. Ia sendiri merupakan tiruan dari rudal Korea Utara "*Rodong-1*"²⁰

Selain itu Iran juga sedang mengerjakan produksi Rudal Shihab-4 yang berdaya jelajah hingga 6.300 km. Rudal ini diyakini sebagai imitasi dari Rudal Rusia yang dikenal dengan nama "SS-N-4 SLBM". Laporan-laporan lain juga mengisyaratkan bahwa saat ini Iran tengah mengembangkan rudal balistik lintas benua yang diberi nama "Shihab-5" dengan daya jelajah mencapai 500 km dan Rudal ini merupakan tiruan pengembangan dari rudal Korea Utara "*Taepodong-1*".²¹

Tujuan utama Iran dalam mengembangkan program persenjataan non-konvensional adalah untuk membangun kekuatan-kekuatan strategis yang efektif dan sempurna sehingga dapat menangkis serangan dan sekaligus memberikan perlindungan dari

²⁰ Adel El-Gogary, hal.271

²¹ ibid

serangan-serangan negara lain khususnya dari Israel. Selain itu Iran juga berkeinginan untuk menjadi kekuatan militer terbesar di kawasan Teluk.

Dari program-program persenjataan Iran dan kontrak-kontrak yang ditandatangani bersama-sama dengan Cina, Rusia, dan Korea Utara jelas bahwa ada konsentrasi pada empat aspek:²²

Pertama, merasionalisasi angkatan darat yang terlalu gemuk dengan angkatan perang yang berpersonel seminim mungkin namun berpelengkapan selengkap mungkin sehingga mampu menjalankan aksi-aksi terbatas. Hal itu terkait dengan restrukturisasi tentara regular dan Angkatan Garda Revolusi Iran, sambil berkonsentrasi pada kemampuan penyebaran di pesisir pantai guna menangkal serangan apapun yang datang dari laut dan melindungi fasilitas-fasilitas serta target-target laut Iran, baik sipil maupun militer.

Kedua, mengembangkan kemampuan tempur marinir Iran, hal ini diwujudkan dengan mendatangkan tiga kapal selam buatan Rusian jenis kilo sejak beberapa tahun silam.

Ketiga, mengembangkan pangkalan-pangkalan industri-industri militer lokal dan melengkapinya dengan persenjataan diri yang semaksimal mungkin baik dalam kondisi damai maupun perang.

Keempat, mengembangkan kemampuan rudal Iran melalui kerjasama militer dengan sejumlah negara seperti Cina, Rusia, dan Korea Utara.

2.3. Program Nuklir Iran

2.3.1. Sejarah Perkembangan Nuklir Iran

Iran mulai tertarik pada teknologi nuklir sekitar tahun 1950-an ketika Shah Iran menerima bantuan dari Amerika Serikat melalui program Atom untuk tujuan damai (U.S. Atoms for Peace).²³ Untuk itu kemudian Iran menandatangani perjanjian NPT (Non-Proliferation Treaty) yang menyatakan bahwa Iran merupakan negara tanpa senjata nuklir. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tahun 1968 dan diratifikasi pada tahun 1970, namun bukan berarti Shah Iran pada

²² Ibid hal. 267-268

²³ http://www.nti.org/e_research/profiles/Iran/Nuclear/

saat itu tidak memiliki ambisi untuk mengembangkan nuklir lebih jauh lagi dengan membangun fasilitas-fasilitas penunjang beserta kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Akan tetapi ambisi tersebut belum dapat terealisasi karena beberapa peristiwa seperti revolusi Iran yang pecah pada tahun 1979 dan perang Iran melawan Irak pada tahun 1980-an. Baru pada tahun 1990-an Iran mulai menjalankan program nuklirnya dengan diawali pembangunan infrastruktur tambang uranium dan melakukan beberapa uji coba.

Dan selanjutnya pada tahun 2002 dan 2003, Iran mendeklarasikan fasilitas nuklir yang dibangun di Arak dan Natanz. Iran juga mengakui adanya percobaan berskala kecil dan berencana membangun fasilitas pengayaan uranium yang lebih besar lagi.

Apabila dirunut, sejarah perkembangan program nuklir, terbagi dalam tiga tahap penting, yaitu:

2.3.1.1. Kurun Waktu 1955-1988

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Iran pada tahun 1950-an telah mulai mengembangkan program nuklirnya, namun pada masa-masa awal itu perkembangannya berjalan lambat. Pada masa ini Iran banyak menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Dimulai pada tahun 1967 ketika Amerika Serikat membantu pusat nuklir Iran di Tehran (Tehran Nuclear Research Center (TNRC)) dengan 5MWt Research Reactor (TRR) dengan menggunakan bahan bakar HEU (Highly Enriched Uranium)²⁴.

Sementara dengan Afrika Selatan, kerjasama mulai ditunjukkan pada tahun 1976 ketika Iran menanam saham sebesar 15% untuk tambang uranium di Rossing, Namibia. Teheran juga menandatangani kontrak sebesar USD 700 juta untuk penyediaan uranium yellowcake dari Afrika Selatan dan mengirim tenaga-tenaga teknisi Iran untuk menjalani pelatihan mengenai nuklir.

²⁴ ibid

2.3.1.2. Kurun Waktu 1989-2003

Pada kurun waktu ini, program nuklir Iran banyak mengalami perkembangan karena Iran banyak menjalin kerjasama internasional dengan negara-negara lain, salah satunya ditunjukkan dengan penandatanganan perjanjian jangka panjang kerjasama di bidang nuklir dengan negara Pakistan dan Cina. Perjanjian tersebut memiliki jangka tiga tahun yaitu sejak 1987 hingga 1990. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan pelatihan personil-personil Iran dan penyediaan reaktor-reaktor dari negara Cina. Kerjasama yang dilakukan Iran juga terjalin dengan negara-negara lain seperti Rusia dan Argentina yang akan dipaparkan lebih detail pada sub bab yang lain.

Hingga tahun 2002, program tersebut masih terus dilanjutkan di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Amerika semakin “gerah” melihat perkembangan nuklir Iran tersebut dan puncaknya benar-benar terjadi pada saat Iran berhasil menemukan uranium di beberapa tambangnya yang berada di wilayah Yazd, yang menjadi titik terang untuk cita-cita Iran dibidang nuklirnya. Langkah-langkah penting Iran tersebut sebenarnya ditentukan oleh teknologi pemisahan dan pengayaan uranium yang dimiliki Iran, yang mampu melakukan penyempurnaan fuel cycle nuklir secara laborat melalui 164 perangkat sentrifugal, yang mampu menghasilkan uranium hingga level 3.5 % (level minimum untuk 1 tegangan listrik). Produksi 235 uranium tersentrifugasi level 9% (yang cukup untuk membuat sebuah senjata / bom nuklir) sedang coba dilewati Iran yang kini memiliki 3 rantai perangkat sentrifugal yang setiap rantainya terdiri dari 164 perangkat tipe B1, dengan rencana bahwa beberapa tahun mendatang Iran dapat menghasilkan lebih dari 50.000 perangkat sentrifugal²⁵

2.3.1.3. Kurun Waktu 2003-2008

Apabila pada kurun waktu sebelumnya Iran lebih terfokus pada menjalin kerjasama internasional dengan negara-negara lain, maka pada kurun waktu ini Iran banyak menjalin hubungan diplomatik dengan komunitas internasional

²⁵ <http://ksmunas.wordpress.com/2008/03/02/ahmadinejad-tangan-terkepal-di-hadapan-paman-sam/>

seperti EU-3 (Perancis, Jerman, dan Inggris). Iran banyak menjalin kerjasama dengan komunitas internasional karena adanya tekanan dari beberapa pihak seperti Dewan Keamanan PBB yang mencurigai Iran mengembangkan nuklir untuk tujuan persenjataan bukan untuk tujuan damai seperti yang telah disepakati sebelumnya.

Hubungan diplomatik Iran dengan komunitas internasional mengalami masalah pada tanggal 1 Agustus 2005 ketika Iran menyatakan akan mengadakan aktivitas konversi uranium di Esfahan. Pada 5 Agustus Iran menolak menandatangani perjanjian jangka panjang dengan EU-3 karena dianggap proposal yang diajukan tidak sesuai dengan proposal yang telah diajukan Iran.

Pada kurun waktu ini, Iran banyak mendapat tuduhan terutama dari pihak Amerika Serikat dan sekutunya berkaitan dengan program nuklirnya. Amerika Serikat dan sekutunya menuduh Iran mengembangkan nuklir untuk tujuan militer dan semua tuduhan itu ditanggapi Iran dengan dingin dan bahkan Iran balik menantang dengan serangkaian uji coba dan pembangunan fasilitas-fasilitas nuklir lainnya yang lebih canggih.

Kronologis perkembangan program nuklir Iran pada kurun waktu 2003 hingga 2008 adalah sebagai berikut:

1. Januari 2003, pemerintah Iran mengizinkan IAEA untuk memeriksa fasilitas nuklirnya. Setelah berkunjung ke sejumlah fasilitas nuklir yang dicurigai Barat pada Februari 2003, IAEA menyimpulkan bahwa sejumlah teknologi sensitif berada dalam kondisi sedang dibangun bahkan ada yang terkait dengan kemungkinan aktifitas pengayaan uranium setelah melihat produksi komponen setrifugal di perusahaan Kalaye Electric.
2. Iran mengakui telah mengimpor sebanyak 1,8 ton material nuklir dari Cina dalam bentuk unsur (UF₆, UF₄, dan UO₂) yang digunakan untuk manufaktur logam uranium. Komponen tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan persenjataan nuklir.
3. Pada Agustus 2003, Iran pertama kalinya terbukti melanggar aturan teknis yang digariskan NPT, bahwa Iran telah melakukan sejumlah 113 percobaan konversi uranium. Eksperimen tersebut melibatkan produksi logam uranium yang diimpor dalam bentuk UF₄ serta produksi UF₄ dari material UO₂.

4. Selama pemeriksaan IAEA pada Juni 2003, sampel lingkungan yang diambil dari Pilot Fuel Enrichment Plant di Natanz terungkap bahwa terdapat deposit Highly Enriched Uranium (HEU).
5. Untuk meredakan ketegangan di antara Iran dan IAEA, Menteri Luar Negeri Inggris, Perancis, dan Jerman memberikan jaminan bahwa Iran akan bekerjasama dan mematuhi aturan IAEA.
6. Pada 21 Oktober 2003, Iran mengumumkan akan bekerjasama dengan IAEA secara transparan kemudian menandatangani Protokol Tambahan serta menghentikan semua kegiatan pengayaan dan reprocessing-nya untuk waktu tertentu.
7. Pada 18 Desember 2003, Iran menandatangani Protokol Tambahan terhadap NPT dan memberi akses kepada IAEA untuk memeriksa fasilitas nuklirnya. Protokol tersebut ditandatangani Ali Akbar Salehi yang merupakan representatif Iran di IAEA yang mewakili pemerintah Iran dan Direktur IAEA El-Baradei.
8. Untuk membujuk Iran agar mau menaati IAEA, Perwakilan Inggris, Perancis, dan Jerman (atau lebih dikenal dengan kelompok EU-3) menawarkan paket insentif sebagai ganti dari program nuklir Iran. Dan pada 14 November 2004 tercapai kesepakatan antara Iran dan EU-3 yang dikenal sebagai Paris Agreement. Inti dari kesepakatan tersebut adalah kesediaan Iran untuk menghentikan aktifitas pengayaan uranium dan sebagai gantinya Iran akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan perdagangan dengan EU-3 dan mendapatkan dukungan dari negara-negara tersebut untuk masuk sebagai anggota WTO.
9. Pada September 2005, Direktur IAEA melaporkan kepada Dewan Gubernur yang mengkonfirmasi niat Iran untuk melanjutkan aktifitas uraniumnya serta temuan-temuan terbaru. Laporan tersebut meliputi temuan adanya pencemaran yang bersifat low enriched uranium maupun highly enriched uranium di beberapa lokasi di Iran. Di samping itu dilaporkan pula program P-1 dan P-2 sentrifugal Iran. Setelah bersidang, IAEA mengeluarkan pernyataan bahwa Iran telah melanggar aturan yang telah disepakati.

10. Januari 2006, Iran melepaskan segel PBB di fasilitas pengayaan nuklir Natanz dan melanjutkan riset bahan bakar nuklir. IAEA memutuskan untuk melaporkan Iran ke Dewan Keamanan PBB. Dan pada 11 April 2006, Iran menyatakan telah melakukan aktifitas pengayaan uranium untuk pembangkit energi.
11. Juli 2006, Dewan Keamanan PBB menuntut Iran menghentikan program pengayaan uranium paling lambat 31 Agustus 2006 dan mengancam akan menjatuhkan sanksi bila Iran melewati tenggat waktu.
12. Pada Nopember 2006, IAEA mengeluarkan laporan bahwa Iran tetap memperkaya uranium. Pada Desember 2006, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1737 agar dalam 60 hari Iran menghentikan program nuklirnya. Resolusi itu antara lain melarang pemasokan, penjualan, dan transfer seluruh material, peralatan, barang-barang, dan teknologi yang dapat memberikan sumbangan pada program nuklir serta rudal balistik Iran. Setelah tenggat waktu terlewati, pada 24 Maret 2007 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1747 mengenai nuklir Iran yang didukung secara aklamasi oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB termasuk Indonesia.

Apabila dibuat satu kesimpulan, program pengembangan nuklir Iran pada tahap pertama mengalami kemandekan di masa Revolusi Iran pada tahun 1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini pemimpin yang menggantikan Shah Pahlavi tidak meneruskan ambisi Shah dalam mengembangkan program nuklir dengan membatalkan hampir semua kontrak perjanjian kerjasama nuklir dengan negara lain. Namun ketika perang Iran-Irak pecah, Khomeini memandang perlu untuk kembali mengembangkan program nuklir. Dan tahap terakhir yaitu kurun waktu 2003-2008 Iran banyak mendapat sorotan dari dunia internasional karena dicurigai mengembangkan persenjataan nuklir dengan melanggar kesepakatan atau perjanjian internasional dimana Iran menyatakan bahwa nuklir yang dikembangkan diperuntukkan bagi tujuan damai.

2.3.2. Tujuan Program Nuklir

Iran memang membutuhkan penambahan kapasitas listrik, setiap tahun kebutuhan akan listrik di Iran semakin meningkat, saat ini Iran mengandalkan hidroelektrik sebagai sumber listrik dan sisanya tetap bersandar pada minyak dan gas. Harga minyak seperti yang kita tahu kian lama kian melambung dan rasanya sangat tidak lagi menggunakan BBM hanya untuk memproduksi listrik. Selain itu walaupun Iran memang memiliki persediaan minyak dan gas alam yang melimpah, namun cepat atau lambat sumur-sumur minyak itu akan kering. Jadi sangatlah logis bila Iran ingin mengembangkan program nuklir untuk tujuan energi, dan kecurigaan Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya tidak bisa dijadikan landasan untuk menghukum Iran, karena selain kecurigaan-kecurigaan tersebut tidak pernah terbukti, Amerika Serikat juga berlaku tidak adil karena India negara yang sama-sama memiliki program nuklir malah diberi akses luas terhadap teknologi nuklirnya. Padahal India jelas-jelas bukanlah negara anggota NPT dan hukum Amerika Serikat sendiri melarang kerjasama dengan negara non-NPT di bidang nuklir.

Iran juga mengatakan bahwa jika ia dapat menggunakan PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya, ia akan mampu mengekspor lebih banyak lagi minyak dan gas yang akan memperbanyak lagi penerimaan devisanya. Kebutuhan listrik Iran saat ini adalah lebih besar daripada yang diramalkan. Dengan pertumbuhan kebutuhan listrik tahunan rata-rata 6 persen hingga 8 persen dan dengan populasi ditaksir akan mencapai 100 juta jiwa pada 2025, Iran tidak dapat menyandarkan diri semata-mata pada minyak dan gas. Penuaan industri minyak, penolakan investasi asing substansial sebagian besar karena sanksi Amerika, tidak dapat lagi mencapai tingkatan produksi pra-revolusi sebesar 5,5 juta barrel per hari. Dari 60 ladang minyak utama Iran, 57 perlu perbaikan, peningkatan dan penekanan kembali, yang akan memerlukan US \$ 40 milyar selama 15 tahun. Level produksi Iran sekarang 3,5 juta barrel per hari adalah dipacu secara meningkat ke arah konsumsi domestik, yang telah tumbuh lebih dari 280 persen sejak 1979. Jika trend ini terus berlanjut, Iran akan menjadi sebuah negara pengimpor minyak total pada 2010, suatu bencana bagi sebuah negara yang

menyandarkan diri pada minyak untuk 80 persen mata uang asingnya dan 50 persen anggaran belanjanya tahunannya.²⁶

Para penentang program nuklir Iran berargumentasi bahwa Iran seharusnya dapat memilih proses pembangkitan listrik yang efisien dan ekonomis dengan pembangkit berbahan bakar gas alam. Argumentasi demikian tampaknya juga tidak valid. Sebuah studi terbaru oleh dua profesor MIT menunjukkan bahwa biaya menghasilkan listrik dari gas (dan minyak) adalah kurang lebih sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan reaktor nuklir—dengan belum menyebut efek buruk emisi karbon atau perlunya menghemat cadangan gas Iran untuk menempatkan Iran dalam kurun 20 atau 30 tahun sebagai salah satu pemasok utama gas ke Eropa dan Asia.²⁷

Mengapa Iran harus menghabiskan sumber-sumber minyak dan gasnya yang tidak terbarukan ketika ia dapat, sama seperti negara-negara kaya energi seperti Amerika Serikat dan Rusia, memilih energi nuklir yang dapat terbarukan? Memang, reaktor nuklir tentu saja memiliki kompleksitasnya sendiri, dan mereka tidak dapat menyelesaikan untuk seluruhnya kronis kekurangan listrik Iran. Namun mereka telah menghadirkan suatu langkah pertama paling penting dalam penganekaragaman sumber energi Iran, yang akan menghemat cadangan energi untuk jangka panjang.²⁸

2.4. Politik Nuklir Iran

2.4.1. Politik Nuklir Iran dengan Negara Lain

2.4.1.1. Dengan Amerika Serikat

Walaupun kini Amerika Serikat banyak menekan Iran terutama berkaitan dengan program nuklirnya, pada awal-awal program yaitu pada tahun 1950-an Amerika Serikatlah yang pertama kali menarik minat Iran melalui program U.S Atoms for Peace. AS pada tahun 1967 menyuplai TNRC (Tehran Nuclear Research) dengan

²⁶ <http://www.batan.go.id/mediakita/current/mediakita.php?group=Aktualita&artikel=akt3&hlm=4>

²⁷ ibid

²⁸ ibid

reaktor 5MWt dengan menggunakan HEU (Highly Enriched Uranium) sebagai bahan bakarnya.

Namun kini Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya (Inggris, Perancis, Israel) begitu gencar melancarkan tudingan bahwa program nuklir Iran bukanlah ditujukan untuk alasan damai yaitu sebagai sumber energi. Alasannya Iran merupakan salah satu negara penghasil minyak di dunia, jadi tidak masuk akal bila Iran sampai mengalami krisis energi dan beralih ke nuklir. Jadi alasan Iran mengembangkan program nuklirnya untuk menggantikan minyak dan gas sebagai sumber energi dianggap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sebagai alasan yang dibuat-buat karena sebenarnya Iran ingin mengembangkan program persenjataan nuklir. Akan tetapi Iran tidak diam saja dengan tudingan-tudingan tersebut. Iran mengemukakan alasan bahwa krisis energi bukanlah hal yang mustahil apabila melihat pertumbuhan penduduk Iran yang cukup cepat dan tentu saja hal tersebut akan berakibat pada meingkatnya kebutuhan negara terutama dari segi ekonomi. Oleh sebab itu minyak dan gas alam tidak hanya untuk dikonsumsi dalam negeri namun lebih diprioritaskan untuk kebutuhan ekspor demi peningkatan pendapatan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang populasinya terus meningkat. Atas alasan inilah Iran berkeinginan mengembangkan nuklir agar negara tersebut tidak hanya mengandalkan minyak sebagai pemenuhan kebutuhan energinya, tidak seperti yang dituduhkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

2.4.1.2. Dengan Cina

Hubungan kerjasama dengan Cina bermula pada tahun 1987 dengan ditandatanganinya perjanjian nuklir jangka panjang dan perjanjian tersebut berlaku hingga tahun 1990. Iran mengirim personel-personelnya untuk mendapat pelatihan di Cina dan Cina juga bersedia menyediakan 27KW Miniature Neutron Source Reactor (MNSR) dan dua 300MW Qinshan power reactors. Cina juga merupakan negara yang telah menyuplai senjata bagi Iran selama masa perang dengan Irak (1980-1988).

Akan tetapi ketika Amerika Serikat gencar meluncurkan tuduhan pada Iran bahwa program nuklirnya bertujuan untuk pengembangan senjata dan pemerintah

Amerika Serikat juga kemudian secara aktif menekan negara-negara yang dianggap potensial dalam penyediaan bahan-bahan yang berkaitan dengan nuklir untuk membatasi hubungan kerjasama nuklir mereka dengan Iran. Akibatnya Cina tidak menyuplai Iran dalam riset reaktornya (yang dikhawatirkan akan berkembang menjadi produksi plutonium) dengan dua Qinshan Power Reactor seperti yang sebelumnya pernah ditawarkan kepada Iran.

Akan tetapi kerjasama mereka tidak berhenti begitu saja, minyak menjadi titik sentral dalam hubungan kerjasama antara Cina dan Iran. Keduanya sama-sama merasakan kecemasan atas meningkatnya pengaruh Amerika di Asia Tengah dan untuk itu kedua negara saling melakukan kunjungan tingkat tinggi dan menyatakan keinginan untuk menjalin kerjasama dalam bidang gas, industri minyak, sektor petrokimia, infrastruktur untuk membangun jaringan pipa gas, proyek jalan tol, dan terowongan untuk pejalan kaki. Cina akan terus mendukung Iran dengan memberikan bantuan teknologi persenjataan, di pihak lain Iran akan menyuplai minyak ke Cina.²⁹

2.4.1.3. Dengan Rusia

Rusia dan Iran menandatangani perjanjian bilateral kerjasama nuklir pada Agustus 1992, dan melanjutkan perjanjian tersebut pada Januari 1995. Rusia menyetujui untuk menyelesaikan pembangunan Bushehr-1 dan juga menyetujui untuk membangun tiga lagi penambahan reaktor. Tahun 1995 juga diadakan pertemuan Rusia-Iran untuk memantapkan kesepakatan akhir mengenai proses penyempurnaan pembangunan reaktor nuklir Iran, yang pada saat itu telah mampu menghasilkan produksi energi nuklir 1.000 megawatt yang akan terus ditingkatkan sampai menuju ke angka 6.000 megawatt dengan perkiraan selesai pada 2020 dan dengan puncaknya 23.000 megawatt, yang merupakan jumlah fantastis yang diharapkan dapat menutupi pasokan listrik Iran setiap tahunnya.³⁰

Kerjasama juga tampak ketika Iran setuju mengirim sebagian besar persediaan uranium yang diperkaya ke Rusia. Bahan itu akan disuling menjadi bahan bakar

²⁹ Adel El-Gogary, hal.148

³⁰ <http://ksmunas.wordpress.com/2008/03/02/ahmadinejad-tangan-terkepal-di-hadapan-paman-sam/>

untuk satu reaktor kecil yang memproduksi isotop-isotop medis. Berdasarkan rencana sementara itu, Iran akan mengirim sebagian cadangan uraniumnya yang diperkaya dalam standar rendah (LEU) ke Rusia tempat bahan itu akan disuling lagi menjadi 19,75 persen murni. Uranium itu masih jauh di bawah bahan untuk senjata nuklir. Para teknisi Perancis kemudian akan menggunakan bahan itu untuk memproduksi batangan bahan bakar yang dipulangkan kembali ke Iran untuk bahan bakar reaktor.³¹

Hubungan kerjasama Iran dan Rusia meliputi berbagai bidang baik dalam politik maupun ekonomi. Rusia merupakan pendukung setia Iran dalam berbagai masalah internasional, sedangkan Iran bagi Rusia merupakan ladang investasi yang subur di berbagai sektor, terutama sektor minyak dan agrobisnis.

Dalam kerjasama ekonomi terwujud dengan penyediaan suplai minyak Moskow yang sebagian besar berasal dari Teheran dan timbal baliknya, Moskow menyuplai sebagian besar senjata terbaru yang dibutuhkan Teheran

Dalam bidang politik Rusia memainkan peranan penting sebagai negara yang mendukung program nuklir Iran. Rusia banyak memberikan usulan-usulan kepada Iran, Masyarakat Eropa dan IAEA agar terbebas dari tekanan dan ancaman Amerika Serikat. Rusia merupakan negara yang mengakui penuh hak Iran untuk memiliki teknologi nuklir dan menentang setiap usaha Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran.

2.4.1.4. Dengan Negara-negara Timur Tengah

Menurut kebanyakan para analis, posisi Iran di peta dunia seperti seekor kucing. Kepalanya berhubungan dengan Turki dan Suriah; punggungnya berhubungan dengan Afghanistan dan perutnya berhubungan dengan negara-negara Teluk. Oleh karena itu kawasan Teluk memiliki posisi strategis dan kuat. Begitulah menurut Dr. Mushtafa Al-Libad, seorang ahli khusus negara Iran.³²

³¹<http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/10/02/15454580/iran.setuju.kirim.uranium.ke.rusia>

³² Adel El-Gogary, hal.96-97

Hubungan kerjasama dengan Kuwait sebagai salah satu negara di kawasan Teluk terlihat dari kunjungan Ahmadinejad ke negara tersebut yang merupakan negara pertama di kawasan Teluk yang dikunjungi presiden Iran tersebut. Kerjasama dalam bidang ekonomi diwujudkan dengan penawaran bantuan dari Iran untuk membuat saluran air layak minum untuk Kuwait yang dialirkan dari Sungai Karon. Sementara dalam bidang keamanan, kedua negara menandatangani nota kesepahaman bidang keamanan untuk memerangi teroris, organisasi kejahatan dan obat bius.

Namun diantara sederet kerjasama tersebut, Iran dan Kuwait memiliki masalah yang paling menonjol yaitu persengketaan seputar lading mutiara laut. Ladang ini menjadi permasalahan yang tiada hentinya antara Kuwait, Iran, dan Saudi. Akan tetapi pertikaian tersebut mampu diatasi dengan penuh ketenangan. Mereka memilih jalan negoisasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan disertai komitmen keinginan mencapai kata sepakat untuk mengakhiri perbedaan selamanya serta melanjutkan semangat persahabatan dan bertetangga baik.

Dalam hubungannya dengan program nuklir Iran, sikap negara-negara Arab kebanyakan memilih netral dengan tidak mendukung ataupun menentang program tersebut.

Apabila melihat sejarah, sebenarnya negara-negara Arab telah berusaha memiliki kekuatan nuklir sejak lebih dari setengah abad yang lalu, akan tetapi hasilnya masih nihil. Berbeda dengan apa yang dialami Iran yang telah berhasil mengembangkan program nuklirnya walaupun harus menghadapi banyak kecaman dari beberapa negara.

Keengganan negara-negara Arab untuk memiliki nuklir sebenarnya tidak muncul semata-mata karena mereka takut terhadap Israel, dan juga bukan disebabkan bahaya penawaran program nuklir kepada pemerintah yang tengah berkuasa akan memicu perlawanan dari kelompok-kelompok perlawanan Islam, akan tetapi sebenarnya keengganan itu disebabkan kurang adanya kemauan keras negara-negara Arab untuk memiliki proyek nuklir dan bukan disebabkan karena mereka memang benar-benar tidak berniat untuk memilikinya.³³

³³ Adel El-Gogary, hal.131

Meskipun program-program nuklir telah dirintis oleh negara-negara Arab dan Iran secara serentak sejak dekade 50-an, namun tahap realisasinya setiap negara berbeda-beda. Ketika proyek-proyek nuklir yang akan dibangun oleh negara-negara Arab telah terhenti, sementara Iran yang nyaris tidak pernah berhenti menghadapi perang, konflik, revolusi internal, dan konfrontasi dengan kalangan oposisi serta tidak pernah berhenti menerima berbagai tekanan internasional, justru berhasil membangun program nuklirnya.³⁴

Jadi penyebab terhentinya program nuklir negara-negara Arab tentu lebih disebabkan karena Amerika Serikat berhasil menakut-nakuti negara-negara Arab tersebut sehingga mereka hanya dapat memilih sebuah pilihan terburuk yaitu dengan meminta perlindungan internasional dari bahaya yang akan muncul.³⁵

Selain hubungan Iran dengan negara-negara yang telah disebutkan diatas, berkaitan dengan program nuklirnya Iran juga telah menjalin hubungan dengan negara-negara lain seperti Venezuela, Kuba, Korea Utara, dan negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok telah menyatakan dukungannya terhadap Iran.

2.4.2. Hubungan Iran dengan Organisasi-organisasi Internasional

Iran telah tergabung sebagai anggota NPT sejak tahun 1970 dimana Iran setuju Mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Dengan ditandatanganinya perjanjian NPT tersebut Iran pun mulai mengembangkan program nuklirnya.

IAEA sebagai organisasi internasional yang mengawasi penggunaan nuklir, selalu berselisih dengan Iran. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), merupakan sebuah lembaga otonom yang bekerja di bawah pengawasan PBB pada tahun 1957. Tujuan pendirian IAEA adalah mengembangkan dan memperluas pemanfaatan sumber daya nuklir untuk berbagai tujuan yang bersifat damai serta mengawasi negara-negara yang menandatangani perjanjian pelarangan transfer senjata nuklir agar tidak memproduksi uranium dalam rangka memproduksi persenjataan nuklir.

³⁴ Adel El-Gogary, hal.133

³⁵ ibid

Persoalan mengenai program pengayaan uranium yang dikembangkan oleh Iran telah lama menjadi isu utama pada Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA). Namun perlu digarisbawahi di sini bahwa IAEA tidaklah memiliki kekuatan yang sama sebagaimana dimiliki oleh Dewan Keamanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa/DK-PBB (Security Council of the United Nations). Amerika Serikat berusaha untuk membawa permasalahan ini kepada Dewan Keamanan dengan tujuan agar Iran dijatuhkan sanksi sehingga Iran menghentikan seluruh program pengayaan uraniumnya. Disebabkan penyerangan terhadap Irak oleh Amerika dan sekutunya telah melahirkan banyak kritikan tajam dari berbagai kalangan, oleh karenanya dalam kasus Iran ini Amerika tidak lagi menggunakan tindakan unilateral sebagaimana dilakukan dalam kasus penyerangan Irak. Amerika ingin memanfaatkan peran Dewan Keamanan dan meyakinkan anggotanya bahwa sanksi terhadap Iran amatlah diperlukan dan kemudian barulah mereka dapat melakukan berbagai tindakan untuk menyerang Iran.³⁶

Pada 25 Maret 2007 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat menjatuhkan sanksi atas Iran. Sanksi baru ini melarang Iran mengekspor senjata nuklir dan menyerukan kepada semua negara untuk tidak menjual atau mentransfer segala macam tank, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter tempur, kapal perang, rudal, dan persenjataan lainnya. Juga meminta negara-negara secara sukarela melarang perjalanan pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam program pengayaan nuklir Iran.³⁷

Sanksi baru itu sesuai Resolusi DK PBB No.1747 juga mencakup pembatasan secara sukarela oleh negara dan lembaga keuangan untuk membuat komitmen baru dalam hal hibah, bantuan keuangan, dan konsesi bagi Iran, kecuali untuk keperluan kemanusiaan. Sanksi juga membuat 28 daftar tambahan individu dan perusahaan yang akan dibekukan asetnya karena terlibat dalam program nuklir Iran, termasuk tiga perusahaan yang terkait dengan Garda Revolusi. Resolusi

³⁶ <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/01/krisis-nuklir-iran.html>

³⁷ Adel El-Gogary, hal.313

menekankan kesediaan komunitas internasional untuk bekerja secara positif demi solusi diplomatik. Iran diberi waktu 60 hari untuk menghentikan program nuklir, atau dikenai sanksi yang lebih jauh.³⁸

Iran sendiri menanggapi dingin sanksi tersebut dan menolak tuntutan itu dan menekankan haknya yang tidak bisa dicabut bagi aktivitas bahan bakar nuklir untuk tujuan damai dan pengayaan uranium.

“Anda tidak dapat mencabut hak sah sebuah negara dengan dasar kecurigaan,” kata Larijani, yang juga Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Agung Iran itu. Larijani juga mengatakan Iran tidak akan tunduk pada imbauan DK PBB untuk menghentikan kegiatan riset nuklir. “Tuntutan seperti itu tidak logis dibuat oleh IAEA atau DK PBB. Itu tidak dapat diterima dan Republik Islam Iran membela kepentingan nasional bangsa Iran,” katanya.³⁹

Resolusi DK PBB tersebut memang agak kontroversial. Semestinya isu nuklir Iran yang bertujuan damai hanya ditangani IAEA dan tidak dibawa ke DK PBB, dan sesuai NPT, negara anggota berhak melakukan pengayaan uranium untuk keperluan pembangkit tenaga listrik atau untuk kepentingan sipil. Sementara IAEA, yang berwenang mengawasi program nuklir di sebuah negara dan terus melakukan inspeksi terhadap situs-situs nuklir Iran, menyatakan tidak ada indikasi Iran (sebagai anggota NPT) sedang melakukan kegiatan nuklir untuk keperluan pembuatan senjata.⁴⁰

Apabila disimpulkan, Sanksi-sanksi yang diterima Iran berkaitan dengan nuklirnya adalah sebagai berikut⁴¹:

³⁸ ibid

³⁹<http://www.batan.go.id/mediakita/current/mediakita.php?group=Aktualita&artikel=akt3&hlm=4>

⁴⁰ Adel El-Gogary, hal.314

⁴¹ “Continuing U.S. Efforts to Discourage Iran's Nuclear Program”, source: The American Journal of International Law, Vol.101 No.3 (July 2007) <http://www.jstor.org/stable/4492957> diakses pada 16/05/2009 pukul 13.37

1. Sanksi dari DKK PBB dikeluarkan pada Desember 2006 yang melarang Iran melakukan kerjasama dalam segala hal yang mengarah pada materi dan teknologi nuklir dan DKK PBB juga membekukan aset-aset dari 10 perusahaan besar di Iran and juga 12 individu-individu yang terlibat dalam program pengembangan nuklir Iran. Resolusi ini merupakan balasan atas sikap Iran yang menentang resolusi DKK PBB sebelumnya yang meminta Iran mengurani dan bahkan megentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan program pengembangan nuklirnya.
2. Sanksi ekonomi yang berupa resolusi 1747 yang dikeluarkan DKK PBB. Hal tersebut merupakan respon atas laporan dari IAEA pada Februari 2007 yang menyatakan bahwa Iran melakukan perluasan bagi program nuklirnya.

Selain tercatat sebagai anggota NPT, Iran juga tergabung dalam Grup Nuklir. Grup Nuklir terdiri dari negara-negara yang betul-betul memiliki senjata nuklir dan jumlah anggotanya delapan negara. Barat memandang masuknya Iran ke dalam Grup Nuklir merupakan sebuah ancaman militer.

Anggota-anggota Grup Nuklir adalah Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Cina yang kelimanya merupakan negara anggota tetap DK PBB. Kelima negara tersebut itu menandatangani perjanjian pelarangan untuk mentransfer senjata nuklir. Lalu ada India dan Pakistan yang walaupun tidak menandatangani perjanjian itu namun terang-terangan berafiliasi pada Grup Nuklir melalui sejumlah percobaan dan berbagai peledakan. Lalu terakhir Iran yang baru saja bergabung.

Selain delapan negara tersebut sebenarnya ada satu negara yang diam-diam menyembunyikan keberadaan nuklirnya dan menolak untuk menandatangani perjanjian itu, negara tersebut adalah Israel. Ada pula beberapa negara yang memiliki berbagai kemampuan nuklir yang jauh melampaui Iran namun tidak disinggung sama sekali, negara-negara tersebut adalah Jerman, Kanada, Belanda, Italia, Belgia, Spanyol, Swedia, Polandia, Korea Selatan, dan Jepang. Negara-negara yang telah disebutkan itu memiliki banyak reaktor, tidak seperti Iran yang hanya memiliki satu reaktor saja. Berbagai reaktor itu atom ini memproduksi uranium lebih dari level 3,5%. Walaupun begitu, kadar sebanyak itu tetaplah

belum mencukupi untuk memproduksi senjata nuklir, dimana untuk memproduksi senjata nuklir dibutuhkan uranium level 92% dari uranium 235.⁴²

2.5. Kendala yang dihadapi Iran

Saat ini masalah pengangguran merupakan kendala paling besar yang dihadapi Iran. Pemerintah dituntut untuk menyediakan 800 ribu lapangan kerja setiap tahun. Sementara minyak pun menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Iran, sebab kilang-kilang pemompaan yang dimiliki Iran dan pemrosesannya tidak dalam kondisi yang memadai sehingga terjadi lonjakan permintaan dalam negeri terhadap bensin yang mencapai angka 60% di atas kemampuan negara, sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut Iran terpaksa harus mengimpor lebih dari 95.000 barrel per hari.

Walaupun Iran memiliki cadangan gas terbesar kedua di dunia, Iran tetap mengimpor gas untuk penggunaan dalam negeri. Dan Iran juga membutuhkan teknologi asing dan ratusan Milliar dollar dalam bentuk investasi asing jika ingin memenuhi permintaan pasar dalam negeri terhadap energi.

Iran pun memiliki ketergantungan yang besar terhadap pendanaan asing untuk sejumlah proyeknya, sebab sektor industri otomotif dan pembangunan galangan kapal berkembang secara cepat melebihi kemampuan bank-bank lokal untuk menyusul keduanya. Industri otomotif yang mempekerjakan puluhan ribu karyawan juga menerima pukulan telak saat penerapan embargo suku cadang mobil. Iran dewasa ini telah berubah menjadi pusat produksi bagi perusahaan-perusahaan industri otomotif dunia seperti Peugeot, Reno, Hyundai, dan Volkswagen.⁴³

Diharapkan dengan berhasilnya program nuklirnya, Iran akan mampu menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi negara tersebut. Karena apabila Iran berhasil mengembangkan nuklir untuk kebutuhan energinya, maka Iran tidak perlu pusing lagi memikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan energi bagi rakyatnya.

⁴² Adel El-Gogary, hal.277

⁴³ Adel El-Gogary, hal.241